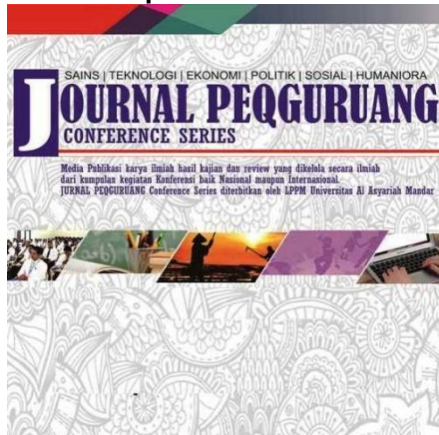


Graphical abstract



PERAN GURU PPKn SEBAGAI FASILITATOR DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN TATA TERTIB SISWA SMP

¹Muh. Akbar, ²Muhammad Nadir, ³Hasanuddin Lauda
^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author

akbar37.r@gmail.com, nadir@yahoo.co.id,

hasan.lauda@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the role of Civics Education (PPKn) teachers as facilitators in addressing violations of school rules committed by students at SMPN 2 Tinambung. The research employed a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that Civics teachers play a strategic role in shaping student character through dialogical and contextual learning approaches, as well as active involvement in extracurricular activities focused on instilling discipline and legal awareness. Furthermore, Civics teachers also collaborate with the school administration and parents in handling rule violations using educational and non-repressive approaches. Thus, Civics teachers play a crucial role in creating a conducive school environment and fostering students' sense of responsibility toward the established regulations.

Keywords: Civics teacher, facilitator, code of conduct, student violations, character.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai fasilitator dalam mengatasi pelanggaran aturan sekolah oleh siswa di SMPN 2 Tinambung. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PPKn memegang peran sentral dalam membentuk karakter peserta didik melalui strategi pembelajaran yang interaktif dan kontekstual, serta melalui keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler yang menanamkan kedisiplinan dan kesadaran hukum. Selain itu, guru PPKn menyelesaikan kerja sama dengan pihak sekolah dan orang tua dalam menyelesaikan pelanggaran tata tertib dengan pendekatan edukatif dan tanpa menggunakan cara represif. Dengan demikian, kehadiran guru PPKn sangat penting dalam menciptakan iklim sekolah yang positif. **Kata Kunci:** Prediksi Kelulusan, C4.5, RapidMiner, Weka, Klasifikas

Kata kunci: Guru PPKn, fasilitator, tata tertib, pelanggaran siswa, karakter.

Article history

DOI: 10.35329/jp.v7i2.6484

Received : 2025-10-18 | Received in revised form : 2025-11-20 | Accepted : 2025-11-25

1. PENDAHULUAN

Journal Pegguruang: Conference Series/Volume 7, Nomor 2, November (2025) | eISSN: 2686-3472

Di tengah arus globalisasi, pendidikan memiliki fungsi krusial dalam membentuk manusia yang berkarakter dan berintegritas (Rivaie dalam Wadu, 2019). (Taher dalam Wadu, 2019) menyatakan bahwa pendidikan berperan strategis dalam menciptakan generasi yang unggul dan berakhlak. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya tidak hanya berorientasi pada aspek akademis, tetapi juga menjadi saran.

Sistem pendidikan di era industry 4.0 juga memengaruhi perubahan tempat belajar, yakni transisi dari era analog ke era digital, juga dianggap penting. Di era digital, lingkungan belajar harus diselaraskan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya internet dan cybernet, yang memungkinkan pemelajarbelajar secara mandiri, dinamis dan tidak terikat oleh hanya satu tempat dan satu sumber belajar, bahkan tidak tergantung pada guru pengajarnya saja, tetapi siswa dapat belajar dari banyak guru, berbagai sumber di dunia maya. Sistem manajemen kelas guru dengan lingkungan digital menyebabkan guru menerapkan konsep multy channel learning yang memperlakukan siswa sebagai pemelajardinamis yang dapat belajar dimana saja, kapan saja, dari siapa saja, dari berbagai sumber di mana saja. Kompetensi guru sebagai fasilitator mendukung siswa dalam belajar sesuai dengan tuntutan digital di dunia industry 4.0. (Bastian dalam Al Yakin, 2019)

Sebagai pendidik dan fasilitator, guru memiliki tanggung jawab dalam menunjang kelancaran proses pembelajaran. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 20, menyatakan bahwa guru wajib merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang berkualitas, serta melakukan evaluasi terhadap hasil belajar.

Paulo Freire (dalam Malik, 2008) mengemukakan bahwa pendidikan bertujuan memerdekakan manusia agar mampu berpikir mandiri dan menciptakan gagasan asli. Ia menolak pendekatan yang bersifat otoriter karena berpotensi membungkam kreativitas dan pemikiran kritis siswa. Sebaliknya, Freire mendorong sistem pendidikan yang mampu menumbuhkan kesadaran kritis dan perubahan sosial. Dalam konteks ini, pelajaran PPKn memiliki peran strategi dalam membentuk etika, disiplin, dan karakter siswa.

Bentuk pelanggaran yang sering ditemukan antara lain merokok di area sekolah, membolos, membawa telepon genggam tanpa izin, membuat janji, dan melakukan perkuliahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bimbingan dari guru sangat diperlukan untuk membentuk sikap dan perilaku siswa yang lebih baik. Menurut Syafliansyah (2023), penyebab pelanggaran tata tertib dapat berasal dari berbagai faktor seperti kondisi keluarga yang tidak harmonis, lingkungan sosial, maupun pengaruh teman sebaya. Oleh karena itu, keterlibatan guru PPKn sebagai figur yang mendidik dan membina kedisiplinan sangat diperlukan untuk menghasilkan generasi muda Peran guru sebagai

fasilitator dalam menyelesaikan pelanggaran tata tertib diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penegakan disiplin merupakan dasar bagi terciptanya suasana belajar yang kondusif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 2 Tinambung, yang terletak di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Fokus pembahasan ditujukan pada siswa kelas VII yang diketahui pernah melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Proses penelitian

Subjek penelitian mencakup siswa kelas VII.

Tabel 3.1 Subjek Penelitian

| No | Subjek | jumlah |
|----|-----------|------------------------------|
| 1. | Guru PPKn | 1 orang (guru kelas VII) |
| 2. | Guru BK | 1 orang |
| 3. | Siswa | 13 orang (siswa kelas VII) |

Sumber : SMPN 2 Tinambung tanggal 18 Desember tahun 2024

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

SMP Negeri 2 Tinambung merupakan salah satu sekolah negeri tingkat pertama yang berlokasi di Kecam

Sekolah ini memperoleh akreditasi B pada tahun 2019.

“Unggul dalam prestasi, berbudaya lingkungan, dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai a

Misi sekolah dijalankan melalui berbagai program seperti pengembangan keterampilan abad ke-21 (4C), pelestarian lingkungan hidup, serta pelatihan berbasis minat dan bakat siswa. Sekolah juga mengedepankan kolaborasi antara semua pihak terkait, baik di dalam mau

Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan 13 siswa dari kelas VII yang pernah melanggar.

1. Jenis Pelanggaran yang Umum Terjadi
 - a) Datang terlambat ke sekolah
 - b) Tidak mengenakan atribut seragam seca
 - c) Merokok di toilet
 - d) Meninggalkan kelas tanpa izin
 - e) Membawa ponsel ke sekolah tanpa seizin guru
 - f) Menyontek saat ujian
 - g) Mengucapkan kata-kata kasar kepada teman
2. Faktor Penyebab Pelanggaran

Penyebab pelanggaran berasal dari dua sisi:

- a) Eksternal : Eksternal: Jarak rumah jauh, lingkungan pergaulan, kurangnya kontrol dari orang tua.
- b) Internal : Kebosanan dalam belajar, motivasi yang rendah, dan sikap acuh tak acuh terhadap aturan sekolah.

3. Strategi

Guru PPKn tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga aktif memberikan pendekatan yang humanis, seperti:

- a) Berdialog secara pribadi dengan sis
- b) Menanamkan nilai kedisiplinan melalui pembelajaran
- c) Konflik menengah antar siswa

4. Peran Guru PPKn sebagai Fasilitator

- a) Membuka Ruang Dialog : Guru saya
- b) Menjadi Teladan Disiplin : Guru menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam keseharian, yang secara tidak langsung menjadi contoh bagi para siswa.
- c) Berkoordinasi dengan Guru BK: Dalam menangani pelanggaran yang cukup berat atau berulang, guru PPKn.
- d) Gudang Kegiatan Pembina: Guru mendorong keterlibatan siswa dalam kegiatan.

5. Efektivitas Pendekatan

- a) Guru tidak menggunakan cara otoriter dalam membina siswa.
- b) Guru mengajak siswa berpikir tentang dampak dari tindakan yang dilakukan

Temuan ini sejalan dengan pendapat Muadzim (2021) bahwa guru tidak hanya sekedar menyampaikan.`

Peran Guru dalam Empat Aspek Utama

- a) Sebagai Penyampai Nilai
- b) Guru menyisipkan pesan-pesan moral dan pentingnya kedisiplinan
- c) Sebagai Pembimbing
- d) Dalam menghadapi siswa yang melanggar aturan, guru lebih mengedepankan pendekatan yang menggali akar masalah, bukan menghukum, serta membantu siswa menyadari dan memperbaiki perilakunya.
- e) Sebagai Mediator
- f) Sebagai Teladan

Sikap positif yang ditunjukkan guru, seperti disiplin, kesopanan, dan tanggung jawab, menjadi panutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan

dokumentasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa guru PPKn memainkan peran sentral sebagai fasilitator dalam menangani pelanggaran tata tertib di SMPN 2 Tinambung. Kolaborasi antara guru PPKn dan guru BK menjadi salah satu faktor penentu dalam membina kedisiplinan dan karakter siswa.

DAFTAR PUSTAKA

Al Yakin, A. (2019, July). Manajemen kelas di era industri 4.0. In *Jurnal Pegguruang Conference Series* (Vol. 1, No. 1, pp. 11-15).

Malik, M. (2008). Pendidikan sebagai jalan pembebasan: Pemikiran Paulo Freire. Yogyakarta: LKIS.

Muadzim, A. M. A. (2021). Konsep guru sebagai fasilitator dan motivator dalam pendidikan agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*.

Wadu, D. (2019). Pendidikan karakter di era globalisasi. L. B., Darma, I. P., & Ladamay, I. (2019). Integrasi nilai moral dalam pendidikan PPKn di SMP. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*.

Syaffiansyah. (2023). Pelanggaran tata tertib siswa: Perspektif guru dan solusi strategis. *Amirta Media*.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2005).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2003).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.